

LAMPIRAN XXIV  
 PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
 NOMOR : Tahun 2010  
 TANGGAL : Juli 2010

**X. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PERPUSTAKAAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
<b>1. Perpustakaan</b>	1. Kebijakan	1. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan kota berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala kota berdasarkan kebijakan nasional.</li> <li>b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional</li> <li>c. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional</li> <li>d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional.</li> <li>e. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional.</li> </ol>
	2. Pembinaan Teknis Perpustakaan	1. Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah kota : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar.</li> <li>b. Pengembangan SDM.</li> <li>c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar.</li> <li>d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan.</li> <li>e. Pengembangan minat baca.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional	1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah kota berdasarkan kebijakan nasional. 2. <u>Penerbitan bibliografi daerah kota.</u> 3. <u>Koordinasi pelestarian tingkat daerah kota.</u>
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	1. Penetapan peraturan dan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala kota sesuai kebijakan nasional. 2. <u>Pengangkatan jabatan fungsional pustakawan</u> 3. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan	1. Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan. 2. <u>Pendidikan formal dan non formal</u> 3. <u>Kerja sama dengan Perpustakaan nasional, provinsi dan kabupaten/ kota</u>

Comment [U1]: DASAR HUKUM?

Comment [U2]: DASAR HUKUM?

Comment [U3]: DASAR HUKUM?

WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH.